



**PENYULUHAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PENYEBARAN HOAKS DI
KALANGAN PELAJAR**

Dwi Ardiyanti

Universitas Potensi Utama Medan

Diterima: 19 November 2019

Direvisi: 23 November 2019

Disetujui: 30 November 2019

Abstrak

Indonesia mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum di tahun 2019. Kemajemukan partai telah mewakili banyaknya kepentingan rakyat Indonesia yang dikenal terdiri dari banyak suku, agama, dan ras. Sehingga, kepentingan rakyat di sini adalah hal utama untuk diperhatikan dalam pemilu 2019. Permasalahan yang biasa muncul ketika ada momentum kampanye adalah banyaknya beredar isu hoaks (palsu) yang digunakan untuk memanipulasi berita demi kampanye 2019. Pemutarbalikan isu ini sangat berbahaya terutama bagi siswa SMA yang masih awam terhadap pengetahuan politik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan berkontribusi untuk membuka pengetahuan politik sejak dini di kalangan siswa SMA.

Kata kunci: Siswa Sekolah Menengah Atas, Pemilu, Hoaks, Tahun Politik, 2019.

COUNSELING IN ORDER TO MINIMIZE THE SPREAD OF HOAKS AMONG STUDENTS

Abstract

Indonesia held election in 2019. This event was a mayor recommendation for democratic country. Various parties were representing the citizen need, in which Indonesia is well known with its tribes, religions, and race. Thus, the representing parties should be the main consideration in election 2019. The common problem faced in the election is various spreading hoax in the real world or social media which is for the sake of black campaign. It is very dangerous for public, especially for teenager in senior high school ages, as noted that they reach the first time for election in the 2019. Thus, this activity is hoped can contribute to national education for senior high school students.

Keywords: High School Students, Election, Hoax, Political Year, 2019

PENDAHULUAN

Penurunan angka partisipan (peserta) pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum di Kota Medan dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang signifikan. Jika dilihat dari berbagai sumber dan survey yang diadakan, hal ini berkaitan dengan tingginya angka korupsi yang ditemukan oleh KPK sehingga membuat para wakil rakyat di daerah kota Medan harus mendekam di tahanan KPK. Tercatat, ada 8 kali kasus berturut-turut yang membuat pimpinan kepala daerah Medan harus mendekam di tahanan KPK. Hal ini sangat miris, mengingat ada banyak orang yang menggantungkan keinginannya pada pimpinan daerah.

Salah satu faktor yang menjadi boomerang dalam kasus tersebut adalah karena dalam politik identitas menyebabkan apatisme masyarakat terhadap partisipasi politik yang disebabkan oleh generalisasi sikap atau karakter suku tertentu yang berulang kali menduduki jabatan serupa namun tidak membawa perubahan apapun dari segi kebijakan politik. Seperti yang terjadi dalam pemilihan wakil kepala daerah (Pilkada) di Kota Medan edisi 7 Desember 2015, dengan tingkat golongan putih (golput) yang tinggi hingga mencapai 70% (Andryan, 2015).

Beberapa kasus tertangkapnya kepala Daerah di wilayah Sumatera Utara, terutama Medan membuat beberapa orang mengalami bentuk kekerasan structural. Salah satu bentuk

* Korespondensi Penulis. E-mail: ardiyanti.1987@gmail.com

kekerasan strukturalnya diwujudkan dengan tingginya angka non partisipasi dalam pemilihan umum. Kekerasan struktural sendiri adalah salah satu bentuk kekerasan non fisik yang terjadi karena sistem yang salah dalam masyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kekerasan struktural terjadi ketika seseorang atau golongan tertentu merasa dirugikan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, atau tradisi budaya. Karena terjadi dalam waktu lama, kekerasan struktural pada umumnya terlihat biasa saja, sebuah fenomena yang selalu terjadi. Namun, kekerasan struktural menyebabkan penderitaan dan bahkan kematian seperti halnya kekerasan fisik, akan tetapi kerusakan yang disebabkan olehnya berakibat lebih lambat, lebih halus, lebih normal, dan lebih sulit untuk diperbaiki (Christie dkk, 2007).

Hal ini kemudian menarik untuk diteliti dengan tingkat kemajemukan masyarakat kota Medan yang tinggi seperti halnya yang terjadi di kota Jakarta, namun tingkat apatisme terhadap partisipasi politik sangat tinggi. Asumsi awal yang dimiliki oleh peneliti adalah dengan tingginya angka golongan putih membuat semakin tidak adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, sehingga hal ini mengindikasikan semakin rendahnya angka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan semakin membuat efektifitas kebijakan yang dibuat menurun. Hal ini memunculkan kecemasan sosial yaitu penurunan efektifitas kebijakan publik di Medan. Sikap apatisme masyarakat kota Medan berpengaruh terhadap partisipasi politik bahkan ketika sebelum kebijakan publik dibuat (sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan) menjelaskan penurunan efektifitas pengambilan kebijakan.

Kebijakan publik kemudian menjadi faktor terdampak dari adanya apatisme masyarakat dalam partisipasi politik. Definisi umum dari kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan maupun yang tidak dilakukan (Anderson, 2003). Kebijakan berhubungan erat dengan pelayanan publik yang mengikutsertakan masyarakat sebagai aktor (subjek) maupun objek di dalamnya. Kebijakan publik adalah produk politik, sehingga unsur unsur politik ikut mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Sebagai produk politik, memang sarat dengan kepentingan politik golongan atau kelompok, namun proporsionalitas kepentingan dan harmoni menjadi sesuatu yang sangat penting

diperhatikan untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Masyarakat adalah pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan harapan, penyuluhan ini agar mengurangi tingkat kecenderungan apatis terhadap partisipasi politik di masa depan.

Namun kemudian fakta dilapangan membuktikan bahwa sebagian besar orang menjadi apatis terhadap partisipasi politik salah satunya disebabkan banyaknya penyebaran berita hoaks di kalangan masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini sangat berbahaya, terutama bagi pelaksanaan iklim demokrasi di Indonesia. Dengan tingginya angka penyebaran hoaks, sehingga memunculkan kecemasan di tingkat masyarakat bawah yang tidak mampu membedakan berita benar dan salah. Sehingga mereka lebih memilih untuk sama sekali tidak ikut serta dalam partisipasi politik. Disadari bahwa kenyataan ini sangat mempengaruhi para pemilih muda, terutama calon pemilih, yaitu mereka yang berusia SMA/SMK alias 17 tahun ke bawah. Pendidikan politik di masa muda menjadi penting, salah satunya adalah dengan menyadari bahwa berita hoaks ini harus ditangkal dan diwaspadai penyebarannya

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada 21 Januari 2019 dan diikuti oleh sekitar 50 siswa dan siswi SMAN 1 Labuhan Deli, Medan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan melibatkan siswa, karena ditakutkan mengganggu proses belajar mengajar, maka kegiatan ini dicukupkan dalam kurun waktu satu jam lengkap dengan waktu tanya jawab.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para siswa SMAN 1 Labuhan Deli Medan. Dalam kegiatan ini dosen sebagai pemberi penyuluhan menekankan arti pentingnya untuk menangkal bahaya hoaks sejak dini baik di dunia nyata maupun dunia maya, terutama bagi mereka calon pemilih muda pada pemilihan umum 2019.

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah tingkat antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan mencapai 75%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya dalam data yang dirilis oleh beberapa lembaga survei tercatat angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak di 8 provinsi, 22 kabupaten, dan 34 kota. Dari data sementara, rata-rata partisipasi pemilih

berkisar 50-65%. Capaian ini jauh dari target KPU, yakni 77,5%. Hal yang mengejutkan pada pelaksanaan Pilkada serentak di kota Medan, bahwa partisipasi pemilih menurun drastis dari pelaksanaan demokrasi sebelumnya. Partisipasi pemilih di kota Medan hanya sekitar 26%. Dengan demikian, kota Medan menjadi daerah yang persentase partisipasi pemilihnya paling rendah di Indonesia atau daerah pemenang golput atau yang tidak berpartisipasi politik, dari 1,9 juta pemilih, sekitar 1,4 juta tidak memberikan hak suaranya (Andryan, 2015).

Menurut CEO Polmark Indonesia, Eep Saefullah Fatah, bahwa ada variabel dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu dievaluasi seperti UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada dan turunannya, yakni Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada. Di sisi lain, ada faktor kejenuhan masyarakat di balik rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak (Andryan, 2015). Rendahnya partisipasi politik di daerah pada Pilkada serentak 2015, menimbulkan pandangan yang berbeda, ada yang menyalahkan penerapan sistem baru dalam proses demokrasi tersebut dan tidak sedikit pula yang menyalahkan kualitas sosok figur calon pemimpin di daerah.

Banyaknya berita hoaks yang menyebar di masyarakat salah satunya juga merupakan faktor pendorong tingginya angka non partisipan alias golput. Di media sosial, masyarakat dengan gampang LIKE and SHARE berita tanpa menyelidiki kebenaran berita tersebut, sehingga berita hoaks yang sudah terlanjur tersebar dan tidak terklarifikasi menjadi faktor pendukung tingginya angka non partisipan. Di kalangan pemilih muda, hal ini harus dapat ditangani dengan baik, salah satunya adalah dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah.

Kegiatan ini berupa penyuluhan untuk meminimalisir angka non partisipan, alias golput dalam pemilu di Medan. Dalam kegiatan ini, pembicara memberikan penyuluhan secara langsung dengan menggunakan media power point presentation kepada para peserta yang sebagian besar sudah memasuki angka pemilih aktif alias 17 tahun.

Di akhir sesi kemudian dilaksanakan tanya jawab sesuai dengan materi yang dibawakan, sehingga antusiasme peserta begitu terlihat terhadap materi yang dibawakan. Para peserta terlihat begitu antusias dengan memunculkan berbagai pertanyaan terkait materi. Sebagian ada yang sudah memasuki masa pemilih, yaitu 17 tahun dan sebagian lagi belum. Sebagian besar dari peserta yang

merupakan siswa SMA di awal sesi merasa heran dengan adanya pendidikan tentang politik di lingkungan sekolah, karena selama ini pendidikan tentang politik tidak diajarkan disekolah. Sehingga, antusiasme begitu terlihat di kalangan para peserta penyuluhan



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan di SMAN 1 Labuhan Deli, Medan.



Gambar 2. Materi Penyuluhan

Dalam kegiatan ini banyak ditemukan adanya siswa SMA/SMK yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang partisipasi politik. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti apa yang disuruh oleh orang tua, sehingga menimbulkan kegelisahan akan markanya isu hoaks yang dapat dipercaya begitu saja tanpa adanya cross cek dari si pembaca. Kegiatan penyuluhan ini membuat para siswa SMA/SMK makin sadar pentingnya hak suara mereka dalam pemilihan umum dan bagaimana buruknya pengaruh hoaks dalam masyarakat. Tidak hanya itu, para peserta penyuluhan juga mulai sadar partisipasi politik sejak dini adalah dimulai dari partisipasi mereka dalam pemilihan Ketua OSIS di sekolahnya. Setidaknya, mereka paham bagaimana proses keterwakilan suara

dari tingkat bawah dan apa itu proses kaderisasi dalam pemilihan.

Hasil kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa antusias bertanya dan menanggapi selama penyuluhan dilakukan. Angka yang didapatkan dari tingkat antusiasme para peserta adalah 85%, dari keseluruhan peserta artinya diantara mereka ada banyak yang tertarik dengan isu ini dan semangat untuk bertanya.

Ketertarikan siswa untuk ikut secara aktif terlibat dalam partisipasi politik sangat penting, bahkan dimulai dari tingkat paling bawah. Dalam penyuluhan ini banyak diantara peserta yang yakin bahwa kebijakan publik dimulai dari partisipasi para kaum muda yang aktif dan peduli dengan lingkungan sekitarnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa hasil kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terkait penanganan berita hoaks. Kegiatan penyuluhan ini berkontribusi untuk menambah pengetahuan politik sejak dini di kalangan siswa SMA. Pada saat proses pelaksanaan, sebagian besar siswa memiliki antusias yang tinggi sebesar 85% artinya diantara mereka ada banyak yang tertarik dengan isu ini dan semangat untuk bertanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar. 2015. *KPU Medan: Masyarakat Enggan Nyoblos Karena Pejabat Selalu Korupsi*. [Online]. <http://medan.tribunnews.com/2015/12/09/kpu-medan-masyarakat-enggan-nyoblos-karena-pejabat-selalu-korupsi> [Diakses Pada 27 Mei 2017 pukul 13.20 WIB]
- Anderson, J. E. 2003. *Public Policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Andryan. 2015. *Golput dan Apatisme Politik Kota Medan*. [Online]: <http://harian.analisadaily.com/opini/news/golput-dan-apatisme-politik-di-kota-medan/198199/2015/12/17>. [Diakses Pada 27 Mei 2017 pukul 13.00 WIB]
- Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter, D. A. (Eds.). (2001). *Peace, Conflict and Violence: Peace Psychology for the 21st Century*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

García, Miguel. 2009. *Political Violence And Electoral Democracy In Colombia Participation And Voting Behavior In Violent Contexts*. University of Pittsburgh.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.